

E-Government dan Kinerja Wakil Rakyat

Oleh:
Ginandjar Kartasasmita

Disampaikan Pada Peluncuran Situs mpr.go.id
Jakarta, 25 Oktober 2001

“There is nothing more difficult to execute, nor more dubious of success, nor more dangerous to administer than to introduce a new system”, Niccoló Machiavelli’s, The Prince, 1513.

Pendahuluan

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan yang dilaksanakan di sektor industri, perdagangan, dan pemeritahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.

Desakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dikaitkan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, memperoleh momentum baru dengan keluarnya “Reinventing Government” dari David Osborne dan Ted Gaebler di tahun 1992.

Mereka menengahkan argumentasi untuk “*consumer driven government*” yang memberdayakan masyarakat dengan mengalihkan kendali dan pengawasan dari birokrasi ke masyarakat. Mereka mengajukan argumentasi “*We don’t need more or less government, we need better government.*”

Memang dalam buku itu, e-government belum disinggung karena waktunya belum tiba, tetapi apa yang mereka kemukakan menunjukkan paradigma baru bagi *good government* atau *good governance*.

Menurut Darrell M. West, seorang pakar Egovernment dari Brown University Amerika Serikat, “*E-government refers to the delivery of information and services online through the Internet or other digital means*”.

Dikatakan oleh Douglas Holmes “*The e-government movement is being driven by the need for government to: cut costs and improve efficiency; meet citizen expectations and improve citizen relationship; facilitate economic development.*”

Di Indonesia, penggunaan internet untuk menyampaikan informasi serta pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat luas telah mengalami pertumbuhan yang pesat sekali dalam beberapa tahun terakhir. Sama dramatisnya dengan perkembangan yang terjadi pada sektor *e-commerce* dan *e-trading*. Bisa di *surf* di internet bahwa saat ini hampir semua instansi pemerintah, baik departemen maupun lembaga non departemen serta pemerintah daerah sudah memiliki website. Layanan yang disediakanpun boleh dikatakan sudah cukup memadai.

Ambil contoh websitenya kantor Sekretariat Negara, yaitu www.ri.go.id. Pada website ini masyarakat dapat men-*download* pidato presiden yang baru saja dibacakan pada pagi harinya. Juga berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, serta Keputusan Presiden dapat segera dimiliki *e-filenya*. Begitu pula website Bappenas, yaitu www.bappenas.go.id. Pada website ini masyarakat dapat men-*download* naskah Propenas lengkap baik versi Bahasa Indonesia maupun versi Bahasa Inggris. Bahkan berbagai dokumen yang selama ini tersimpan rapat-rapat seperti *Blue Book*, *Billing Rate*, dll dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Pada hari ini kita menyaksikan peresmian website MPR.

Di berbagai *e-groups* masyarakat turut mendiskusikan berbagai persoalan bangsa. Kami mendapati bahwa konsep ekonomi kerakyatan dalam minggu-minggu ini sedang diseminarkan di internet oleh salah satu milist group yang memiliki anggota 550 orang yang meliputi masyarakat umum, LSM, mahasiswa, pejabat di pusat dan daerah, unsur pimpinan dan anggota MPR/DPR, para kepala daerah propinsi/kabupaten/kota, para menteri dan mantan menteri, dosen, pengusaha, para eks patriat dari lembaga donor seperti, serta para Indonesianis di seluruh dunia.

Di samping itu saat ini sudah banyak yang mencantumkan *email address* perusahaan maupun pribadi pada kartu namanya.

Dengan demikian sesungguhnya *E-government* bukanlah barang baru bagi bangsa Indonesia. Namun perkembangannya di tanah air belum menunjukkan kemajuan yang terlalu berarti. Memang ada berbagai kendala, baik fisik maupun sosial ekonomi yang menjadi penyebabnya.

Menurut PT. Telkom *Annual Report 2000*, saat ini sambungan telepon yang terpasang di Indonesia adalah hanya 6.54 juta *fixed lines* atau sekitar 3.26% per-kapita dengan pertumbuhan rata-rata 18.2% per tahun sejak 1995. Untuk *cellular lines* mencapai jumlah sekitar 3,2 juta telepon, atau sekitar 1,6% per-kapita dengan pertumbuhan rata-rata 65.8% per tahun sejak 1995. Sedangkan *internet service provider* (ISP) tercatat ada 46 buah, namun yang beroperasi hanya sekitar 35 buah. Dilaporkan bahwa yang 11 buah ISP tidak dapat beroperasi semenjak adanya krisis pada pertengahan tahun 1997. Dilaporkan juga bahwa hampir seluruh ISP beroperasi di Jakarta. Dalam laporan PT. Telkom itu disebutkan pula bahwa jumlah warung internet adalah sejumlah 2000 kios, jumlah PC yang memiliki akses terhadap internet hanya sebesar 1%.

Keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mendayagunakan potensi teknologi pendukung *E-government* maupun *e-business* secara baik, dan oleh karena itu Indonesia terancam *digital divide* yang semakin tertinggal terhadap negara-negara maju.

Kesenjangan prasarana dan sarana teknologi antara kota dan pedesaan, juga memperlebar jurang perbedaan sehingga terjadi pula *digital divide* di dalam negara kita sendiri. Indonesia perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan teknologi yang potensinya sangat besar itu, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempererat persatuan bangsa sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan secara berkelanjutan. Di dalam hal ini bersama-sama kita perlu secara proaktif dan dengan komitmen yang tinggi membangun kesadaran politik dan menumbuhkan komitmen nasional, membentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, serta meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi secara sistematis.

Dengan kenyataan tersebut, kita dituntut untuk melaksanakan kebijakan serta melakukan langkah-langkah dalam bentuk program aksi yang dapat secara nyata mengatasi *digital divide*, dengan arah pengembangan yang jelas.

E-Government untuk Mempersatukan Bangsa dan Memberdayakan Rakyat

Indonesia pada saat ini tengah dalam masa transisi menuju negara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dalam negara kesatuan dan persatuan bangsa yang kukuh. Untuk mempercepat proses demokrasi dalam kesatuan dan persatuan tersebut, Indonesia harus mampu mendayagunakan potensi teknologi untuk keperluan:

1. Meniadakan hambatan pertukaran informasi antar masyarakat dan antar wilayah negara, karena hanya dengan demikian berbagai bentuk kesenjangan yang mengancam kesatuan bangsa dapat teratasi secara bertahap.
2. Memberikan kesempatan yang sama serta meningkatkan ketersediaan informasi dan pelayanan publik yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperluas jangkauannya agar dapat mencapai seluruh wilayah negara.

3. Memperbesar kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang dengan teknologi yang mampu memanfaatkan pasar yang lebih luas.
4. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan inovasi dalam sektor produksi, serta memperlancar rantai distribusi, agar daya saing ekonomi nasional dalam persaingan global dapat diperkuat.
5. Meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik, serta memperlancar interaksi antar lembaga-lembaga pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, sebagai landasan untuk membentuk pemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

E-government dapat juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, juga untuk menjembatani kesenjangan politik dan budaya, serta meningkatkan keharmonisan di kalangan masyarakat.

Namun pada kenyataannya, dalam kondisi pasar yang sangat efisienpun banyak kelompok sosial dan wilayah di Indonesia yang tidak terjangkau oleh jaringan informasi komersial. Tanpa berbagai bentuk intervensi, ancaman *digital divide* antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan serta antara "yang mempunyai" dan "yang tidak mempunyai" akses ke jaringan informasi, akan semakin nyata. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dikembangkan pola kemitraan dan kerjasama dengan sektor swasta untuk memaksimalkan pendayagunaan jaringan dunia usaha nasional yang tersebar diseluruh wilayah negara, serta menerapkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengatasi kesenjangan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan menyediakan pelayanan yang layak bagi semua masyarakat.

Warung Telekomunikasi dan Warung Internet memainkan peranan penting dalam mengurangi digital divide. Wartel dan Warnet ini secara berkelanjutan memperluas jangkauan pelayanan telepon dan internet, baik di daerah kota maupun desa bagi pelanggan yang tidak memiliki akses sendiri di tempat tinggal atau di tempat kerjanya. Oleh karena itu langkah-langkah lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan Wartel dan Warnet, yang dikaitkan dengan upaya memperluas jangkauan dan kandungan informasi pelayanan publik, memperluas pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengembangkan sentra-sentra pelayanan masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta menyediakan layanan e-commerce bagi usaha kecil dan menengah, sangat diperlukan. Dengan demikian akan terbentuk Balai-balai Informasi Masyarakat (BIM) sesuai dengan konsep Community Tele Center (CTC) yang dinilai masyarakat dunia sebagai salah satu cara yang patut dikembangkan untuk mengatasi digital divide. Untuk melayani lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh Wartel dan Warnet, pemerintah perlu mengembangkan berbagai program serta insentif agar BIM atau CTC dapat tumbuh dan berkembang juga di daerah tersebut.

Sektor swasta harus berperan aktif dalam penyediaan informasi serta mengembangkan berbagai aplikasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam rangka itu, perlu diupayakan untuk mendorong perkembangan industri *information content* dan aplikasi. Pendayagunaan perangkat lunak *open sources* perlu mendapatkan perhatian khusus.

Di pihak lain, pendayagunaan teknologi untuk mendukung E-government sering terhambat oleh kemampuan masyarakat menggunakannya, di mana bahasa seringkali merupakan salah satu faktor penghambat. Agar difusi teknologi dapat dipercepat dan diperluas, maka di samping berbagai upaya mendorong masyarakat luas untuk menyiapkan diri serta meningkatkan kemampuan mendayagunakan teknologi, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus bagi berkembangnya standard dan piranti antarmuka berbasis bahasa Indonesia untuk mempermudah penggunaan produk teknologi bagi penduduk yang tidak mampu berbahasa asing.

Government On-Line

Penerapan jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai *good governance* dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan guna antara lain memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran anggaran.

Agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan, diperlukan kerangka arsitektur dan platform yang kompatibel bagi semua departemen dan lembaga pemerintah, serta penerapan standardisasi berbagai hal yang terkait dengan penggunaan teknologi secara luas. Berbagai pengembangan yang perlu segera dilaksanakan di antaranya adalah pengembangan *G-online backbone* bagi kepentingan semua instansi pemerintah dan penyediaan layanan masyarakat, pembaharuan kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah.

Untuk keperluan itu pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan kesiapan penggunaan kemajuan teknologi untuk mengimplementasikan *government on-line* secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan dan pelatihan teknologi untuk meningkatkan keahlian pegawai negeri di semua tingkatan.

E-Democracy

Untuk kepentingan kita, pada hari ini salah satu penerapan *e-government* adalah *e-democracy*. Douglas Holmes mengingatkan kita bahwa F.D. Roosevelt adalah yang pertama kali memanfaatkan radio untuk menjangkau masyarakat luas untuk menyampaikan pesan-pesan politik. J.F. Kennedy adalah yang pertama kali memanfaatkan media TV untuk memenangkan kampanye presidennya, dan di tahun 1998 seorang mantan pegulat Jesse Ventura dengan memanfaatkan jaringan internet maju secara independen dalam kampanye gubernur di negara bagian Minnessota. Ia berhasil mengalahkan dua orang politisi yang telah mapan.

Internet membuka cakrawala baru dalam kehidupan politik. Dengan biaya yang lebih murah, partisipasi yang lebih luas, interaksi yang lebih intensif, keterbukaan dan akuntabilitas, internet akan merubah budaya dan pola politik di masa mendatang.

Selain untuk kampanye, banyak negara sudah menggunakan pemungutan suara secara elektronik dengan hasil yang cukup memuaskan seperti di Brazil. Hasilnya lebih cepat, lebih murah dan lebih aktual.

Memang telah terjadi masalah pada waktu sistem manual diganti dengan sistem otomatis, seperti pemilihan Presiden AS baru-baru ini, namun apabila kita paham akan cara-caranya keuntungannya bisa mengatasi kesulitannya.

Internet juga membuka partisipasi luas dalam proses demokrasi seperti dikatakan oleh Holmes "*the web can transform an ailing system of representative democracy into a more robust form of participative democracy*".

Dengan internet, bukan hanya keputusan-keputusan politik, proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga politik, seperti di dalam partai maupun di lembaga-lembaga perwakilan, dapat diikuti dengan penuh dan segera, serta selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Internet tidak ada jam kerja dan tidak pernah libur. Di Swiss pembicaraan di parlemen bukan hanya diliput dengan TV tetapi juga dengan internet, karena bagi rakyat banyak masalah yang dibicarakan tidak selalu bisa diikuti, karena misalnya suatu dokumen yang dibahas bisa dianggap sudah dibacakan kalau sudah dibagikan, meskipun tidak dibaca. Melalui internet publik dapat mengikuti secara lebih rinci apa sebetulnya materi yang jadi pembicaraan.

E-democracy juga membuka partisipasi rakyat untuk turut serta dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan-keputusan politik yang penting bagi kehidupannya. Misalnya, salah satu alasan mengapa ada gagasan Komisi Konstitusi adalah adanya kesan bahwa perubahan UUD dilakukan hanya oleh orang-orang yang terbatas dan tidak melibatkan rakyat banyak. Memang ada tim ahli, dan sosialisasi di daerah-daerah, namun jangkauannya tetap terbatas. Dengan internet dialog interaktif antara Badan Pekerja atau PAH I dengan publik yang luas dapat dibuka, sehingga masyarakat dapat turut serta memberi masukan dan berdiskusi atau “*chatting*” dengan wakilnya.

Hasilnya akan meningkatkan kualitas demokrasi, karena sekat antara rakyat dan wakil-wakilnya dapat dikurangi, dan jarak antara proses pengambilan keputusan serta putusan yang diambil tidak terlalu jauh dari aspirasi, keinginan, pandangan, dan kehendak yang ada di hati sanubari dan pikiran yang hidup di masyarakat.

E-democracy juga akan mendekatkan rakyat dengan wakilnya, tanpa harus ada pertemuan secara fisik dengan konstituennya. Demikian pula konstituen tidak perlu jauh-jauh menemui wakilnya untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan.

Penutup

E-government diyakini dapat mendukung menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas di pemerintahan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menerapkan *on-line government* dan *cyber democracy*.

Namun demikian *e-government* dan *e-democracy* itu penerapannya masih dalam tahap awal, termasuk di negara yang paling maju sekalipun. Alasannya, selain masalah fisik, keterbatasan jangkauan dan jaringan internet oleh keterbatasan hardware, juga oleh karena budaya IT belum meluas, terutama di kalangan pemerintah sendiri, dan juga para politisi, apalagi masyarakat luas. Yang sekarang sudah menggunakan adalah dunia usaha, mereka yang berada di dunia akademik dan riset, serta kelompok-kelompok profesional.

Kesempatan ini harus digunakan untuk menata sistemnya dengan sebaik-baiknya, agar pada waktu digunakan secara luas, dapat berlangsung dengan lancar dan aman, karena penggunaan internet pun, banyak masalahnya, seperti para *hackers*, *virus*, soal kerahasiaan, *privacy*, dsb.

Agar supaya *e-government* dapat terlaksana dengan baik, maka ada beberapa langkah persiapan yang perlu diambil, antara lain adalah sbb:

1. Meningkatkan *information technology awareness*

Sampai saat ini penggunaan teknologi informasi (TI) di tingkat pemerintahan dirasakan masih belum memadai untuk mendukung terciptanya *e-government for good governance*. Untuk itu perlu ditingkatkan *IT awareness* di lingkungan pemerintahan. Peningkatan *IT awareness* ini bisa dimulai dengan penggunaan *e-mail* bagi pejabat tinggi pemerintah dan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi *e-government* yang ber“*human interface*” berikut petunjuk berbahasa Indonesia.

2. Meningkatkan SDM TI

Agar supaya setiap unit TI di instansi pemerintah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan mandiri, maka perlu peningkatan kemampuan SDM TI di pemerintahan. Standard SDM TI pemerintah dan pelatihan yang ada perlu ditinjau kembali apakah masih sesuai dengan kebutuhan. Prasarana pelatihan SDM TI pemerintah yang ada harus dioptimalkan penggunaannya dengan program yang sesuai untuk kebutuhan *e-government*.

3. Pemakaian bersama Informasi

Sumber informasi di pemerintahan masih banyak duplikasi dan tidak terintegrasi. Masing-masing instansi memelihara informasi miliknya sendiri tanpa aturan yang jelas dalam hak akses bagi instansi lain dan publik. Karena itu diperlukan adanya pemakaian bersama informasi untuk mengurangi duplikasi. Jenis informasi yang dipakai bersama harus dipelajari dan didefinisikan lebih lanjut.

4. Transparansi dalam penyampaian informasi

Ada informasi yang harus disampaikan ke masyarakat luas, ke instansi-instansi pemerintah tertentu, dan ada juga informasi yang harus tetap rahasia di tangan pemerintah. Karena itu perlu adanya kebijakan tentang *transparency* dari informasi yang dimiliki pemerintah.

5. Keamanan dan Informasi yang bersifat rahasia

Informasi, transaksi dan komunikasi intra dan inter instansi pemerintah, dan antara masyarakat dengan instansi pemerintah harus aman, mengikuti aturan-aturan tertentu. Informasi yang dikeluarkan pemerintah juga harus berkualitas baik dan dapat dipercaya. Pemerintah juga harus menjamin *privacy data* setiap anggota masyarakat yang ada di pemerintahan. Karena itu diperlukan *security, information and privacy act* untuk sistem *e-government*.

6. Inter-operabilitas antar instansi pemerintah

Sampai saat ini, IT pada masing-masing instansi pemerintah masih banyak yang terpisah dan tidak terintegrasi satu sama lainnya. Integrasi diperlukan untuk pemakaian informasi bersama demi meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga pelayanan masyarakat bisa ditingkatkan. Untuk itu perlu adanya standard inter-operabilitas antar instansi pemerintah agar komunikasi, pemakaian bersama dan pertukaran informasi bisa terlaksana.

7. Komputerisasi pelayanan masyarakat

Untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan produktivitas pemerintah dalam pelayanan masyarakat, maka perlu otomatisasi. Otomatisasi ini dapat dimulai dengan pembuatan Identitas Nasional yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi umum seperti KTP, SIM, STNK, pajak, paspor dan sebagainya. Pelayanan masyarakat ini akan tersedia secara on-line, yang disebut juga *government on-line*.

8. Pengembangan berbagai Sistem Informasi Manajemen di lembaga pemerintahan

Peningkatan efisiensi dan produktivitas pemerintah juga perlu ditunjang dengan berbagai Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang diperlukan di setiap lembaga pemerintahan. SIM-SIM ini harus terpadu dengan semua jenis pelayanan masyarakat (*government on-line*) yang terkait.

9. Meningkatkan peran industri TI lokal dalam *e-government*

Menyadari bahwa pemerintah juga merupakan pasar TI bagi industri lokal, maka pemerintah harus mempermudah dan mengutamakan akses produk industri lokal ke pemerintah, untuk mendorong pertumbuhan industri TI lokal.